

PENGARUH PEMAHAMAN DAMPAK KORUPSI TERHADAP MINAT MASYARAKAT SEBAGAI *CITIZEN CONTROL*

Saadah*, Syakieb Arsalan, Dini Verdana Latif
Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama, Indonesia
Email: saadah.5507@widyatama.ac.id*

ABSTRACT

Corruption is defined as "misuse of public office for personal gain". This definition leads to corruption being concentrated in the hands of the elite. Corruption interferes with governance practices, reducing public funds available to support economic growth programs, in turn, will reduce public trust in the government. To prevent corruption, the government develops e-government. The implementation of e-government aims to enable the government to provide information on the administration of government activities in a transparent and accountable manner and to make it easier for the public to access this information. With the ease of access, it is expected that the community can participate in overseeing the government activities as citizen control. The interest of the community as citizen control can also be influenced by people's understanding of the impact of corruption. If the public is aware of losses due to corruption, the community will be encouraged to monitor the government carefully. This study aims to determine the effect of understanding the impact of corruption on community interest as citizen control. This research is an explanatory research. Sample in this study are residents of the city of Bandung. The results of the study indicate that understanding the impact of corruption by the public has an effect on people's interest as citizen control.

Keywords: *corruption, transparency, accountability, citizen control*

ABSTRAK

Korupsi didefinisikan sebagai "penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi". Definisi ini mengarah korupsi adalah terkonsentrasi di tangan para elit. Korupsi mengganggu praktik tata kelola pemerintahan, mengurangi dana publik yang tersedia untuk mendukung program pertumbuhan ekonomi, yang, pada akhirnya akan menyebabkan berkurangnya kepercayaan publik pada pemerintahan. Untuk mencegah terjadinya korupsi pemerintah mengembangkan *e-government*. Penerapan *e-government* bertujuan agar pemerintah mampu memberikan informasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan secara transparan dan akuntabel serta memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi tersebut. Dengan kemudahan akses tersebut, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan sebagai *citizen control*. Minat masyarakat sebagai *citizen control* juga dapat di pengaruhi oleh pemahaman masyarakat mengenai dampak korupsi. Jika masyarakat mengetahui kerugian akibat adanya korupsi maka masyarakat akan terpacu untuk mengawasi pemerintahan secara seksama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman dampak korupsi terhadap minat masyarakat sebagai *citizen control*. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori. Sampel pada penelitian ini adalah warga kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dampak korupsi oleh masyarakat berpengaruh terhadap minat masyarakat sebagai *citizen control*.

Kata kunci: korupsi, transparansi, akuntabilitas, *citizen control*

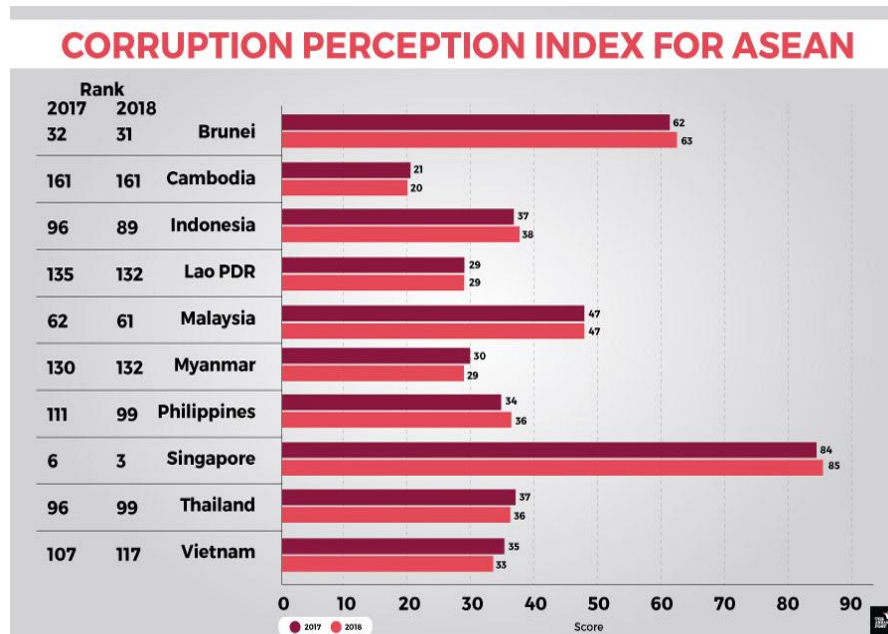
PENDAHULUAN

Survei yang di lakukan oleh *Transparency International* pada tahun 2018 menunjukkan bahwa korupsi banyak terjadi pada negara yang memiliki fondasi demokrasi lemah. Politisi yang tidak demokratis dan populis dapat menggunakan jabatannya untuk mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi. Hasil ini di peroleh dengan menggunakan alat ukur yang dinamakan Indeks Persepsi Korupsi. Indeks ini diukur dengan menggunakan 13 sumber data berbeda yang memberikan persepsi korupsi sektor publik dari pelaku bisnis dan juga pejabat negara. Indeks ini juga meliputi kebijakan negara dan penilaian kelembagaan bank pembangunan, serta survey opini eksekutif forum ekonomi dunia dan para pakar.

Pada tahun 2018, indeks menunjukkan bahwa lebih dua pertiga negara di dunia mendapat nilai yang rendah, di bawah 50. Nilai indeks yang tertinggi adalah 100 yang menunjukkan bahwa suatu negara bebas dari korupsi dan nilai nol menunjukkan bahwa suatu negara adalah negara yang tingkat korupsinya paling tinggi. Dari 180 negara di dunia, Denmark dan Selandia Baru menduduki tempat pertama dan Somalia berada di posisi juru kunci. Negara yang demokrasi penuh memiliki Indeks rata rata sebesar 75, demokrasi yang cacat rata-rata nilainya adalah 49 dan rezim otokratis rata-rata 30 (Khidhir, 2019).

Persepsi korupsi menurut tingkat ASEAN skor indeks tidak banyak berubah jika dibandingkan tahun sebelumnya. Negara yang memiliki skor tertinggi adalah Singapura, yang berada pada ranking ke 3 dunia. Indonesia hanya berada pada peringkat ke 89 dunia. Meskipun skor tersebut mengalami peningkatan jika di bandingkan tahun sebelumnya, namun posisi tersebut belum dapat dikatakan baik, karena skornya hanya 37. Skor ini menunjukkan masih tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Gambar 1 menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi untuk negara-negara ASEAN.

Korupsi akan berdampak besar pada kemakmuran negara. Berdasarkan data dari Tranparansi Internasional Indonesia (TII) hampir sekitar 30-40 persen dana APBN dan APBD hilang karena kasus korupsi. Kasus korupsi yang terbanyak adalah untuk pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah yang berjumlah 70 persennya. Presiden Indonesia, Joko Widodo menegaskan bahwa korupsi menyebabkan kerugian finansial bagi negara dan juga merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Untuk mencegah korupsi, Presiden mengatakan bahwa mekanisme birokrasi harus diarahkan dengan menggunakan sistem *e-government*. Sistem *e government* membuat birokrasi dapat dilakukan dengan lebih efisien sehingga akan meningkatkan layanan publik dan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa kunci utama dalam mencegah dan memerangi korupsi adalah partisipasi masyarakat (Setiawan, 2015).



Sumber : <https://theaseanpost.com/article/corruption-how-asean-performing>

Gambar 1. Indeks Persepsi Korupsi Negara-Negara ASEAN

Berdasarkan uraian di atas, bahwa korupsi berdampak pada kemakmuran suatu negara, maka pemerintah membuat sistem *e government* dengan maksud untuk mencegah terjadinya korupsi. Kunci utama mencegah korupsi dengan sistem *e government* adalah dengan partisipasi masyarakat. Masyarakat harus berperan aktif sebagai *citizen control*. Peran ini akan maksimal jika masyarakat mengetahui dampak buruk akibat korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman masyarakat terhadap minat masyarakat berperan sebagai *citizen control*.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

E-Government

Pengertian *e-government* menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation, 2016) adalah penggunaan internet dan web untuk memberikan informasi berkaitan dengan aktivitas pemerintah dan memberikan layanan kepada masyarakat. Untuk mencapai efektivitas dalam mengimplementasikan *e-government*, informasi keuangan terkandung dalam *e-government* harus transparan dan akuntabel. Transparansi informasi keuangan adalah informasi tentang anggaran yang mengacu pada ketersediaan informasi tentang peraturan penganggaran, proses penganggaran, transparansi mengenai pendapatan dan pengeluaran pemerintah, dan manajemen aset. Transparansi juga mencakup informasi yang memberikan pemahaman yang jelas kepada publik mengenai pengambilan keputusan dan informasi anggaran. Informasi lain

yang diperlukan adalah informasi tentang kinerja pemerintah, yang meliputi pelaporan realisasi anggaran, proses pemantauan (Hladchenko, 2016).

Tujuan dari implementasi *e-government* adalah untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, bisnis dan industri. Selain itu, tujuan dari *e-government* adalah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara transparan. Masyarakat dapat dengan mudah melakukan akses untuk mengetahui aktivitas apa saja yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan adanya informasi yang transparan, masyarakat dapat berpartisipasi untuk mengawasi jalannya pemerintahan sehingga pada akhirnya berdampak pada berkurangnya korupsi, *e-government* memberikan pendekatan baru yaitu pemerintah yang lebih berfokus kepada kepentingan warga masyarakat dan mempromosikan antikorupsi.

Dampak Korupsi

Korupsi dalam pemerintahan didefinisikan sebagai "penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi". Definisi ini mengarah korupsi terkonsentrasi di tangan elit yang termasuk kelompok berpenghasilan tinggi. Korupsi juga mempengaruhi besarnya pengeluaran layanan pemerintah. Pengeluaran pemerintah akan semakin besar, akibatnya korupsi sangat merugikan bagi masyarakat yang sangat bergantung pada pemerintah, yaitu masyarakat dari golongan miskin (Wong, 2017). Korupsi pada pemerintahan dimungkinkan terjadi pada pemerintah dan regim yang berkuasa menyediakan peluang tersebut, dengan cara mengabaikan institusi pencegah korupsi ataupun para penguasa terlibat melakukan korupsi. Berbagai jenis korupsi yang sering terjadi dalam pemerintahan adalah kasus penyuapan, pencurian aset negara dan penggelapan pajak. Kasus penyuapan terbanyak dilakukan di bidang pengadaan barang dan jasa. Pengusaha akan memberikan suap kepada pejabat agar mereka mendapatkan kontrak pemerintah. Kasus suap juga terjadi pada proses perijinan, dan kasus hukum seperti penggelapan pajak, pencurian aset dan pencucian uang. Korupsi juga dapat memanipulasi pendapatan dan pengeluaran publik. Korupsi akan berdampak buruk bagi pemerintah dan masyarakat. Dampak korupsi dapat ditinjau dari dua aspek yaitu aspek ekonomi dan sosial.

Dampak ekonomi akibat terjadinya korupsi adalah dengan meningkatnya nilai investasi. Investasi memerlukan biaya yang besar dengan cara memanipulasi pengeluaran yang berupa *mark up*. Nilai investasi yang tinggi juga di sebabkan adanya kasus penyuapan. Pengusaha akan menyuap pejabat untuk mendapatkan kontrak, sehingga biaya kontrak akan semakin besar. Akibat adanya kesempatan melakukan korupsi pada investasi maka pemerintah akan mengalihkan komposisi pengeluaran publik. Pengeluaran publik lebih banyak digunakan untuk

membeli peralatan baru di bandingkan dengan pengeluaran yang diperlukan untuk fungsi dasar (pendidikan dan kesehatan) karena pada bidang pendidikan dan kesehatan lebih sedikit peluang untuk mendapatkan komisi. Dari sisi pendapatan korupsi dapat mengurangi penerimaan pemerintah melalui pajak. karena pembayaran pajak dapat di kompromikan (Šumah, 2018).

Korupsi juga berdampak pada aspek sosial. Korupsi mengakibatkan pemerintah tidak mampu memberikan investasi publik yang berkualitas, menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang akan menjadi beban bagi pelaku ekonomi. Kondisi ini berdampak pada mahalnya harga jasa pelayanan publik seperti biaya pendidikan dan kesehatan ekonomi biaya tinggi juga menyebabkan timbulnya ketimpangan pendapatan (KPK, 2019).

Ketimpangan pendapatan telah terbukti berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi. Jika korupsi meningkatkan ketimpangan pendapatan, juga akan mengurangi pertumbuhan dan dengan demikian memperburuk kemiskinan. Korupsi dapat menghambat pemerintah mengurangi kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat akan mengakibatkan meningkatnya angka kriminalitas (Petersen & Schoof, 2015).

Dampak sosial lain akibat terjadinya korupsi adalah berkurangnya kepercayaan publik kepada pemerintah, karena Korupsi mengganggu praktik tata kelola pemerintahan. Pemerintah mengurangi penyediaan layanan publik dan mengurangi dana publik yang tersedia untuk mendukung secara efektif program pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kemampuan pemerintah untuk membantu warganya khususnya warga yang miskin (Chetwynd, Chetwynd, & Spector, 2003).

Citizen Control

Partisipasi warga negara sebagai *citizen control* dalam hal manajemen keuangan adalah berpartisipasi dalam hal mengawasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Setiap manajer publik dalam kerangka akuntabilitas harus menetapkan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada, biasanya dalam bentuk anggaran. Tujuan dan pencapaian yang diharapkan harus didefinisikan dengan jelas. Manajer publik harus memperhitungkan pengeluaran mereka berdasarkan anggaran yang disetujui, menjelaskan alasan pengeluaran berlebih atau kurang. Penekanannya adalah pada pencapaian hasil dengan sumber daya yang dikonsumsi. Sebagai *citizen control* warga negara juga harus berpartisipasi dalam pengambilan keputusan oleh manajer publik. Keputusan yang diambil oleh manajer publik melibatkan pengeluaran sumber daya keuangan dalam bentuk pengadaan barang dan jasa. Aspek penting dari akuntabilitas adalah bahwa manajer publik secara rutin

membuat keputusan berkenaan dengan kejujuran, kehati-hatian dan nilai uang. Mereka harus dapat mengelola aset, kewajiban, pendapatan, dan pengeluaran untuk mengoptimalkan arus kas dan meminimalkan biaya modal. Anggota masyarakat juga harus dapat memantau apakah manajer publik dapat membuat laporan secara tepat waktu, akurat dan konsisten, memelihara semua catatan dengan cara yang memadai sehingga jejak audit dapat dideteksi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman dampak korupsi terhadap minat masyarakat sebagai *citizen control*. Indikator pemahaman dampak korupsi, terdiri dari dua aspek yaitu aspek ekonomi dan sosial. Indikator dampak korupsi terhadap aspek ekonomi:

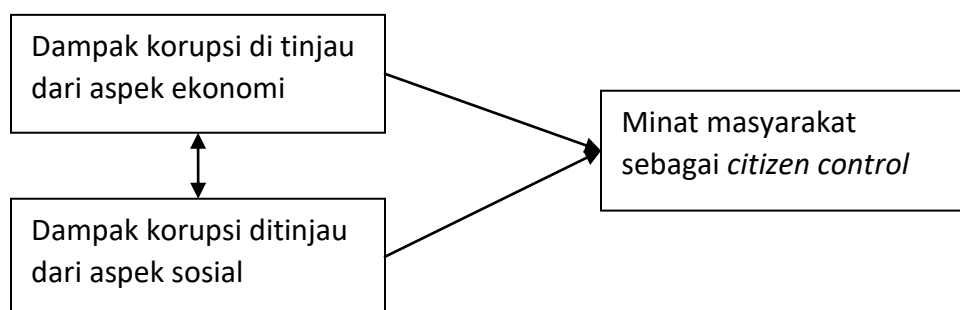
1. korupsi akan berdampak pada membatasi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi secara produktif.
2. korupsi akan berdampak pada pengurangan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan.
3. korupsi akan berdampak pada pengurangan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan.

Sedangkan indikator dampak korupsi terhadap aspek kehidupan sosial masyarakat:

1. korupsi akan berdampak pada memburuknya distribusi pendapatan.
2. korupsi akan berdampak pada upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan.
3. korupsi dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
4. korupsi akan mengarah pada timbulnya bentuk kejahatan lainnya.

Untuk indikator minat masyarakat sebagai *citizen control* adalah sebagai berikut:

1. Minat berpartisipasi dalam penyusunan anggaran.
2. Minat sebagai pengawas pada pelaksanaan anggaran.
3. Minat untuk memantau pembuatan laporan.
4. Memberikan laporan jika terjadi penyimpangan anggaran.



Gambar 2. Model Penelitian

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menentukan seberapa besar kuatnya pengaruh pemahaman dampak korupsi terhadap minat warga menjadi *citizen control*. Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner baik secara offline maupun online penyebaran kuesioner dilakukan pada Bulan Mei-Maret 2019.

Sampel Penelitian

Populasi penelitian adalah warga masyarakat kota Bandung. Dalam penelitian ini sampel dibatasi karena masih kurangnya pemahaman masyarakat kota Bandung terhadap *e-government*. Sampel meliputi 200 warga kota Bandung yang paham akan implementasi *e-government*. Sampel meliputi warga masyarakat yang pernah menggunakan *e-government* untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah dengan menggunakan kuesioner. Untuk kuesioner mengenai pemahaman dampak korupsi meliputi 7 pernyataan. Setiap pernyataan di berikan skor 1 samapai dengan 5. Kriteria skor:

- Skor 1 = jika responden sangat tidak setuju dengan pernyataan
- Skor 2 = jika responden tidak setuju dengan pernyataan
- Skor 3 = jika responden ragu-ragu dengan pernyataan
- Skor 4 = jika responden setuju dengan pernyataan
- Skor 5 = jika responden sangat setuju dengan pernyataan

Untuk kuesioner mengenai minat masyarakat sebagai *citizen control* meliputi 4 pernyataan. Setiap pernyataan di berikan skor 1 samapai dengan 5. Kriteria skor :

- Skor 1 = jika responden sangat tidak berminat
- Skor 2 = jika responden tidak berminat
- Skor 3 = jika responden ragu-ragu dengan pernyataan
- Skor 4 = jika responden berminat
- Skor 5 = jika responden sangat berminat dengan pernyataan

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan analisis jalur dengan persamaan :

$$Y = a + bX_1 + cX_2 + e$$

Y = Minat masyarakat sebagai *citizen control*

X1 = Pemahaman dampak korupsi ditinjau dari aspek ekonomi

X_2 = Pemahaman dampak korupsi ditinjau dari aspek sosial

a,b,c = koefisien

e = error

Karena data merupakan data ordinal, maka data tersebut harus diubah terlebih dahulu menjadi data interval dengan menggunakan metode *successive interval*. Perubahan skala data menjadi interval dimaksudkan agar dapat dianalisis dengan menggunakan *multiple regression*. *Multiple regression* juga mensyaratkan asumsi linieritas, heteroskedastisitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif ini berdasarkan jawaban kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Dari 200 kuesioner yang disebar, hanya 187 responden yang memberikan jawaban secara lengkap. Statistik deskriptif pemahaman dampak korupsi oleh masyarakat disajikan dalam Tabel 1. Hasil jawaban kuesioner menunjukkan bahwa skor rata-rata di atas 3, sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat memahami dampak korupsi berdasarkan aspek ekonomi dan sosial. Statistik deskriptif minat masyarakat sebagai *citizen control* disajikan dalam Tabel 2. Hasil jawaban kuesioner menunjukkan bahwa skor rata-rata di atas 3, sehingga dapat disimpulkan masyarakat berminat menjadi *citizen control*.

Hasil Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur, karena adanya kaitan yang erat antara dampak korupsi dari aspek ekonomi dan dari aspek sosial. Dari hasil analisis yang disajikan dalam Tabel 3, terlihat hubungannya sebesar 0,954. Dampak korupsi dari aspek ekonomi menyebabkan nilai investasi menjadi tinggi. Pengeluaran pemerintah menjadi tidak efisien, karena adanya *mark up* yang akan menguntungkan pejabat pemerintah, yang berdampak pada distribusi yang tidak merata dan pemerintah tidak mampu mengurangi angka kemiskinan. Kemiskinan menyebabkan terjadinya tindak kriminalitas.

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pemahaman dampak korupsi oleh masyarakat terhadap minat masyarakat sebagai *citizen control*, maka dilakukan analisis regresi multiple. Berdasarkan hasil uji F dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pemahaman dampak korupsi oleh masyarakat terhadap minat masyarakat sebagai *citizen control* pengaruhnya adalah sebesar nilai R Square yaitu sebesar 74%. Hasil uji F disajikan dalam tabel 3 dan hasil perhitungan R Square disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Pemahaman Dampak Korupsi oleh Masyarakat

Pernyataan	Tanggapan (persentase)					Skor rata-rata
	Sangat Setuju	Setuju	Netral	Tidak Setuju	Sangat tidak setuju	
Dampak korupsi ditinjau dari aspek ekonomi						
Korupsi akan berdampak pada membatasi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi secara produktif	53,2	36,4	6,5	2,6	1,3	4,376
Korupsi akan berdampak pada pengurangan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan	54,6	27,3	11,7	3,9	2,6	4,277
Korupsi akan berdampak pada pengurangan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan	54,6	27,3	11,7	3,9	2,6	4,277
Dampak korupsi ditinjau dari aspek sosial						
Korupsi akan berdampak pada memburuknya distribusi pendapatan	63,6	32,5	26	0	1,3	4,513
Korupsi akan berdampak pada upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan	63,6	28,6	5,2	1,3	1,3	4,519
Korupsi dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah	88,3	9,1	1,3	0	1,3	4,831
Korupsi akan mengarah pada timbulnya bentuk kejahatan lainnya	83,1	16,9	0	0	0	4,831

Tabel 2. Statistik Deskriptif Minat Masyarakat sebagai *Citizen Control*

Pernyataan	Tanggapan (persentase)					Skor rata-rata
	Sangat Berminat	Berminat	Ragu ragu	Tidak Berminat	Sangat tidak berminat	
Minat berpartisipasi dalam penyusunan anggaran	33,3	36	24	4	2,7	3,932
Minat sebagai pengawas pada pelaksanaan anggaran	64,9	27	8,1	0	0	4,568
Minat untuk memantau pembuatan laporan	40,8	28,9	19,7	5,3	5,3	3,946
Memberikan laporan jika terjadi penyimpangan anggaran	75	19,7	5,3	0	0	4,697

Tabel 3. Hasil Analisis Data

Correlations				
		X1	X2	Y
X1	Pearson Correlation	1	.954**	.835**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	187	187	187
X2	Pearson Correlation	.954**	1	.862**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	187	187	187
Y	Pearson Correlation	.835**	.862**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	187	187	187

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 4. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2470.948	2	1235.474	122.459	.000 ^b
	Residual	847.466	84	10.089		
	Total	3318.414	86			

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X2, X1

Tabel 5. Hasil Perhitungan R Square

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.863 ^a	.745	.739	3.176

a. Predictors: (Constant), X2, X1

Jika di tinjau berdasarkan komponen dampak korupsi, ternyata terdapat satu komponen yang berkaitan dengan minat masyarakat sebagai *citizen control* yaitu dampak korupsi

berdasarkan aspek sosial. Hasil uji untuk mengetahui pengaruh masing-masing komponen transparansi keuangan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Pengaruh Masing-Masing Komponen Transparansi Keuangan terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.465	.979		.475	.636
	X1	.184	.254	.134	.727	.469
	X2	.730	.184	.734	3.969	.000

a. Dependent Variable: Y

Pembahasan

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, masyarakat sudah memahami dampak dari korupsi ditinjau dari aspek ekonomi maupun sosial. Untuk aspek ekonomi yang dirugikan secara langsung adalah pemerintah dengan adanya nilai investasi yang tinggi karena adanya mark up. Akibatnya pemerintah mengurangi pengeluaran di bidang pendidikan dan kesehatan. Dampak ekonomi ini kemudian akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Distribusi pendapatan yang tidak merata, meningkatnya kemiskinan sehingga akan menimbulkan ketidakpercayaan kepada masyarakat. Karena masyarakat merasa dirugikan, maka masyarakat perlu melakukan pengawasan. Masyarakat berminat untuk menjadi *citizen control*. Hal ini dapat dilihat dari hasil statistik deskriptif menunjukkan hasil yang cukup tinggi berkaitan dengan minat masyarakat sebagai *citizen control*.

Dari hasil analisis data hanya pemahaman dampak korupsi berdasarkan aspek sosial saja yang berpengaruh terhadap minat masyarakat sebagai *citizen control*. Dampak korupsi berdasarkan aspek ekonomi tidak memiliki pengaruh. Minat masyarakat sebagai *citizen control* di picu jika masyarakat itu mengalami langsung kerugian akibat adanya korupsi seperti distribusi yang tidak merata, bertambahnya penduduk miskin. Adanya distribusi pendapatan yang tidak merata akan menimbulkan kecemburuan sosial. Adanya pertambahan penduduk miskin dapat berakibat munculnya tindakan kriminal.

SIMPULAN

Korupsi memiliki dampak yang merugikan bagi masyarakat. Kerugian tersebut dapat ditinjau dari aspek ekonomi dan aspek sosial. Kerugian berdasarkan aspek ekonomi tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Jika ditinjau dari aspek ekonomi, maka kerugian tersebut di rasakan langsung oleh pemerintah dengan adanya pengeluaran investasi yang cukup tinggi sehingga pemerintah mengurangi pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan. Sedangkan jika di lihat dari aspek sosial, maka dampak dari korupsi akan di rasakan langsung oleh masyarakat, seperti distribusi pendapatan yang tidak merata, kemiskinan, tindakan kriminal. serta munculnya ketidakpercayaan kepada masyarakat. Faktor inilah yang memberi motivasi bagi masyarakat untuk bertindak sebagai *citizen control*.

DAFTAR PUSTAKA

- Chetwynd, E., Chetwynd, F., & Spector, B. (2003). Corruption and poverty: A review of recent literature. *Management Systems International*, 600, 5–16.
- Hladchenko, L. (2016). Government financial accountability and transparency in the digital world. *ICT in Education, Research and Industrial Applications*.
- Khidhir, S. (2019). Corruption: How is ASEAN performing? *The Asean Post*. Retrieved from <https://theaseanpost.com/article/corruption-how-asean-performing>
- KPK. (2019). Dampak Korupsi terhadap Sosial dan Kemiskinan. Retrieved from ACLC KPK website: <https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-sosial-dan-kemiskinan>
- Petersen, T., & Schoof, U. (2015). *The Impact of Income Inequality on Economic Growth. Bertelsmann Impulse# 2015/05*.
- Setiawan, A. (2015). To Prevent Corruption with *e-government* System. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Retrieved from Sekretariat Kabinet Republik Indonesia website: <https://old.setkab.go.id/en/to-prevent-corruption-with-e-government-system/>
- Šumah, Š. (2018). Corruption, causes and consequences. In *Trade and Global Market*. IntechOpen.
- Wong, M. Y. H. (2017). Public spending, corruption, and income inequality: A comparative analysis of Asia and Latin America. *International Political Science Review*, 38(3), 298–315.